

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

1. Perkembangan hargabarang kebutuhan pokok dan penting (bapokting), barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan (non-IHK).

Pada Juli 2025, harga komoditas umumnya mengalami kenaikan, terutama pada minggu ke-4, di mana cabai rawit naik sebesar 1,84% dan bawang putih sebesar 0,4567%. Kenaikan ini bisa mengindikasikan tingginya permintaan atau menurunnya pasokan. Tren kenaikan ini berlanjut di awal Agustus, dengan harga bawang merah meningkat 0,6425% pada minggu pertama. Namun mulai minggu ke-3 dan ke-4 Agustus, terjadi penurunan harga seperti daging ayam ras turun -0,83% dan cabai merah turun -0,1693%, yang bisa disebabkan oleh peningkatan pasokan atau menurunnya permintaan masyarakat.

Penurunan ini semakin tajam pada September 2025, di mana secara konsisten harga daging ayam ras mengalami penurunan sebesar -0,94% hingga -1,25% selama tiga minggu berturut-turut. Beberapa komoditas lain seperti cabai merah dan telur ayam ras juga menunjukkan penurunan signifikan. Ini bisa menjadi sinyal bahwa pasokan sedang melimpah atau ada faktor musiman yang mempengaruhi distribusi dan konsumsi. Secara umum, ketersediaan/stok dan harga bahan pokok masih dalam kategori aman dan terkendali. Hal tersebut ditandai dengan tetap tersedianya kebutuhan masyarakat Kutai Barat serta kemampuan Masyarakat dalam membeli bahan pokok tetap terjaga.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah

Beberapa permasalahan pengendalian inflasi di Kabupaten Kutai Barat pada Triwulan III tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Kenaikan harga beras medium dan premium selama bulan Juli-September 2025

Selama bulan Juli sampai September terjadi kenaikan harga beras medium di Kabupaten Kutai Barat. Kabupaten Kutai Barat masih menduduki posisi no 4 tertinggi setelah Kabupaten Mahulu dan Kutai Timur yaitu sebesar Rp. 17.000/Kg untuk Zona 2. Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Kutai Barat melakukan pengecekan langsung di lapangan dan memperoleh informasi bahwa hal tersebut disebabkan beberapa faktor, antara lain : Kondisi jalan Nasional yang menghubungkan Kutai Barat dan Samarinda sebagai ibukota Provinsi mengalami kerusakan yang cukup parah di beberapa titik, sehingga menyebabkan distribusi tidak lancar dan meningkatkan biaya operasional. Walaupun telah secara masif dilaksanakan Gerakan Pangan Murah oleh Dinas Ketahanan Pangan Kutai Barat namun harga beras medium dan premium tidak dapat serta merta langsung turun namun tetap stabil di angka Rp. 17.000/kg.

2. Komoditas Pangan sebagai Faktor Dominan Penyebab Inflasi/kenaikan harga

Pada bulan Agustus, Harga bawang merah juga mengalami kenaikan signifikan dalam sebulan terakhir, hal tersebut berimbas kepada pengusaha warung/catering. Kenaikan harga bawang merah ini juga diikuti dengan kenaikan harga bawang putih. Untuk mengatasi kelangkaan dan

kenaikan bawang merah, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat melaksanakan Sidak Pasar dan Operasi Pasar serta High Level Meeting.

3. Ketergantungan Tinggi terhadap Pasokan dari Luar Daerah

Sebagai daerah yang bukan merupakan sentra produksi, Kabupaten Kutai Barat sangat bergantung kepada pasokan dari luar daerah seperti Samarinda, untuk sejumlah komoditas utama seperti beras, gula, bawang merah, bawang putih, cabe dan daging ayam ras. Beberapa komoditi tersebut masih disuplay atau dipasok dari daerah lain, terutama Samarinda, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan.

4. Distribusi barang mengalami kendala karena akses jalan

Akses jalan yang masih rusak dan parah di beberapa titik di Kecamatan damai, Kecamatan Bongan dan Perbatasan dengan Kabupaten Kutai Kertanegara, sangat mempengaruhi kelancaran distribusi, terjadinya kerusakan pada banyak titik menyebabkan pergerakan harga menjadi naik karena biaya angkut yang lebih besar. Kerusakan disebabkan banyaknya kendaraan pengangkut kelapa sawit dan CPO yang beroperasi di Wilayah Kabupaten Kutai Barat. Permasalahan jalan ini sudah seringkali dilaporkan ke Pihak Provinsi maupun Pusat. Pemerintah Kabupaten tidak bisa menganggarkan perbaikan karena status jalan Negara.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah

Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di Kabupaten Kutai Barat pada Triwulan III tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Gerakan Pangan Murah dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan setiap hari Kamis mulai bulan Agustus sampai dengan Bulan Desember tahun 2025, dengan bekerja sama Bulog Samarinda serta beberapa pedagang lokal.
2. Kegiatan Pemantauan harga dan stok Bahan pokok serta bahan pangan menjelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesiadilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Barat
3. Kegiatan High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Kutai Barat serta Zoom Meeting Pengendalian Inflasi yang dilaksanakan setiap hari senin.
4. Sidak Pasar dan Operasi Pasar dilaksanakan karena harga bawang merah yang naik dengan signifikan serta mulai langka di pasar. Dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 2025 dengan dipimpin oleh Bapak Bupati Kutai Barat dan Wakil Bupati Kutai Barat yang dilaksanakan di Pasar Jaras Kecamatan Barong Tongkok, Pasar Olah Bebaya Kecamatan Melak Ilir dan Pasar Nala Kecamatan Linggang Bigung. Sidak Pasar ini juga dihadiri Forkopimda seperti Kapolres, Dandim, Kepala Kejaksaan, Ketua Dewan serta Para Kepala OPD dan Sekretariat Bagian Perekonomian.
5. High Level Meeting Pengendalian Inflasi dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus 2025 dengan dipimpin oleh Wakil Bupati Kutai Barat dan dihadiri oleh Forkopimda, serta OPD anggota TPID serta BPS dan Perbankan
6. Pengawasan LPG 3 kg dilaksanakan oleh Bagian Perekonomian di 16 Kecamatan dilaksanakan pada Bulan Agustus 2025
7. Pengawasan distribusi solar bersubsidi dilaksanakan di 16 Kecamatan wilayah Kabupaten Kutai Barat yang terdapat APMS/SPBU di laksanakan pada bulan Juli dan

September 2025

8. Surat Usulan Kuota JBT dan JBKP untuk tahun 2026 dari Pemerintah Kabupaten Kutai Barat kepada Gubernur Kalimantan Timur pada tanggal 16 September 2025 adalah sebesar 10.338 KL untuk JBT (Solar) dan 34.583KL untuk JBKP (Pertalite)
9. Surat Usulan Kuota LPG 3 kg untuk tahun 2026 dari Pemerintah Kabupaten Kutai Barat kepada Gubernur Kalimantan Timur pada tanggal 16 September 2025 adalah sebesar 8.683 MTon

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah

Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di Kabupaten Kutai Barat pada Triwulan III tahun 2025 adalah sebagai berikut :

a. Keterjangkauan Harga

1. Maksimalkan Operasi Pasar dan/atau Gerakan Pangan Murah untuk komoditas pangan strategis yang memiliki potensi peningkatan tekanan harga seperti beras, bawang dan minyak
2. Sidak Pasar dan Distributor khususnya komoditas pangan strategis seperti Agen Beras, Agen Bawang Merah dll
3. Mendorong penambahan frekuensi penerbangan atau penambahan rute Sendawar-Samarinda (masih diupayakan Dinas Perhubungan)

b. Ketersediaan Pasokan

1. Berdayakan BUMD sebagai penyangga pangan melalui perluasan Kerjasama Antar Daerah (KAD) dengan daerah sentra produksi. Sementara ini masih diupayakan BUMD Kutai Barat untuk bisa disehatkan.
2. Penyaluran bantuan alsintan dilaksanakan oleh OPD teknis
3. Menggalakkan program tanam di pekarangan masyarakat seperti Cabe, sayur, buah dll
4. Penyediaan/pemanfaatan *cold storage* untuk produk hortikultura
5. Meningkatkan pengadaan cadangan pangan pemerintah oleh Dinas Ketahanan Pangan Kutai Barat

c. Kelancaran Distribusi

1. Subsidi ongkos angkut untuk penyediaan bahan pokok seperti beras, telur, gula, minyak, bawang diupayakan terus oleh Dinas Ketahanan Pangan Kutai Barat
2. Penguatan dan pemantauan kuota BBM di SPBU, khususnya solar untuk angkutan umum

d. Komunikasi yang Efektif

1. Himbauan belanja bijak dan tidak *panic buying* kepada masyarakat
2. Diversifikasi pangan berbasis kearifan lokal

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah

Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di Kabupaten Kutai Barat pada Triwulan III tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi dengan masing-masing OPD melalui *high level meeting* untuk menyusun strategi pengendalian inflasi daerah.
2. Penguatan kelembagaan TPID dengan melaksanakan *Capacity Building*/studi tiru ke Daerah Produsen/ champion
3. Memanfaatkan dana Biaya Tidak Terduga (BTT) untuk pengendalian inflasi, termasuk mendorong pembentukan kios penyeimbang di kabupaten Kutai Barat
4. Fokus untuk melakukan peningkatan produktivitas dan pembangunan sarana pangan untuk komoditas pokok dan penyumbang inflasi tinggi.
5. Meningkatkan seruan konsumsi secara wajar dengan bijak berbelanja, serta menjaga ekspektasi masyarakat melalui publikasi informasi yang benar mengenai harga dan ketersediaan pangan.